

IMPRESI PENGENDALIAN INTERNAL, PERSEPSI KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI

Bayu Pratama

Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Corresponding Author: bayupratama9387@gmail.com

Article History

Received: 06-08-2022

Revised: 13-08-2022

Accepted: 09-09-2022

Keywords:

*Pengendalian Internal,
Persepsi Kesesuaian
Kompensasi, Ketaatan pada
Aturan Akuntansi,
Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; 2) Persepsi kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; 3) Ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 4) Pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, dan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel penelitian ini adalah 30 responden. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Package for The Social Sciences. Hasil penelitian ini adalah 1) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan persepsi kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 4) Terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, dan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kecurangan akuntansi sendiri menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Yulianti (2016), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu : (1) kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2) pernyataan palsu atau salah pernyataan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi

untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan; (3) korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam lembaga pemerintahan sendiri, kecurangan kerap ditemukan. Umumnya kecurangan yang dilakukan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah adalah yang berkaitan dengan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik akhir-akhir ini marak menjadi pemberitaan media masa yang menghebohkan masyarakat. Masyarakat seakan sudah jengah dengan maraknya pemberitaan oknum pejabat publik yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat justru malah melakukan tindak korupsi yang merugikan masyarakat secara luas. Di Indonesia terdapat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satu tujuannya adalah untuk memerangi tindak korupsi. Berdasarkan data dari KPK yang didapat dari website KPK, berikut adalah jumlah tindak korupsi berdasarkan instansi dari periode tahun 2008 sd 2016 :

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasar Instansi

Instansi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DPR dan DPRD	7	10	7	2	6	2	2	3	15
Kementerian/lembaga	13	13	16	23	18	46	26	21	39
BUMN/BUMD	2	5	7	3	1	0	0	5	11
Komisi	2	0	2	1	0	0	0	0	0
Pemerintah Provinsi	5	4	0	3	13	4	11	18	13
Pemkab/Pemkot	18	5	8	7	10	18	19	10	21
Jumlah	47	37	40	39	48	70	58	57	99

Dalam tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa instansi pemerintahan baik provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota cukup banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menarik untuk dicari penyebabnya. Alasan-alasan mengapa seseorang melakukan kecurangan atau tindakan korupsi tersebut hampir senada dengan beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengetahui penyebab seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) yaitu pengaruh perilaku tidak etis, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi pemerintah kabupaten Pasaman Barat (Yuliani,2018), pengaruh keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar (Fachrunisa,2015), analisis pengaruh keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi (Fauwzi,2011). Beberapa penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan beragamnya variabel, sampel dan populasi, serta metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “Impresi Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan pada Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan

Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi).”

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kecurangan Akuntansi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Kemendikbud:2013) cenderung adalah agak miring, tidak tegak lurus, condong, menaruh minat (keinginan,kasih,dsb) kepada, suka (ingin) akan. Kecenderungan adalah kecondongan (hati), kesudian, keinginan (kesukaan) akan, sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi secara umum dapat diartikan suatu sikap condong, terdorong, memihak, kearah yang melakukan tindakan ilegal yang disengaja untuk memberikan manfaat/kerugian diluar maupun didalam organisasi.

Menurut Tuanakotta (2013:28) definisi *fraud* ialah “*Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust, these acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service, to avoid payment or loss of services, or to secure personal o business advantage*”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan dan kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukn oleh individu , dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Definisi *fraud* menurut *Institute of Internal Auditor* (Priantara,2013:4), adalah perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuhan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian, atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan) tindakan penyimpangan, tipu daya, pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung dan merugikan pihak lain.

Faktor-faktor Kecurangan Akuntansi:

1) *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar.

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjam harta perusahaan dan tidak merugikan perusahaan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna dalam Karyono (2013) dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 1999 terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau lebih dikenal dengan teori *GONE* sebagai berikut:

- 1) *Greed* (Keserakahan), Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas, jadi kecurangan timbul karena keserakahan dalam diri seseorang.
- 2) *Opportunity* (Kesempatan), Setiap orang di dalam perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan, kecurangan pada umumnya didorong oleh kesempatan tanpa adanya kesempatan kecurangan tidak akan terjadi.
- 3) *Need* (Kebutuhan), Setiap orang mempunyai kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi sekalipun melakukan kecurangan.
- 4) *Exposure* (Pengungkapan) Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan mendorong seseorang melakukan kecurangan yang sama.

Jenis-jenis Kecurangan Akuntansi

Jenis- jenis kecurangan menurut Zimbelman at al (2014:13-16) sebagai berikut:

1. Kecurangan pegawai

Kecurangan pegawai dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kecurangan secara langsung terjadi ketika pegawai mencuri kas perusahaan, persediaan, peralatan, perlengkapan atau aset lainnya. Kecurangan ini bisa juga terjadi ketika perusahaan membayar kepada perusahaan fiktif seolah-olah melakukan transaksi tetapi kenyataan perusahaan tidak menerima barang atas transaksi tersebut. kecurangan tidak langsung terjadi ketika pegawai menerima suap atau kickback dari pemasok, pelanggan atau pihak luar perusahaan untuk memungkinkan memberikan harga jual yang lebih rendah, harga beli yang tinggi, barang-barang yang tidak pernah sampai tujuan atau barang-barang dengan kualitas yang rendah.

2. Kecurangan pemasok

Kecurangan pemasok selalu berakibat pada harga-harga barang yang dibeli terlalu mahal atau pengiriman barang-barang dengan kualitas rendah atau tidak adanya pengiriman terhadap barang/jasa walaupun pembayaran sudah dilakukan.

3. Kecurangan pelanggan

Kecurangan pelanggan terjadi ketika pelanggan tidak membayar barang yang mereka beli atau mereka mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan.

4. Kecurangan manajemen

Kecurangan manajemen sering disebut dengan kecurangan laporan keuangan, kecurangan ini melibatkan manipulasi yang bersifat menipu dalam laporan keuangan oleh manajemen puncak.

5. Penipuan investasi dan kecurangan pelanggan lainnya.

Menurut Tuanakotta (2007) dalam buku survai *fraud* (2016) *Association Of Certified Fraud Examinations* (ACFE) adalah salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan sebagai berikut:

- A. Korupsi (*corruption*), Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan KPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam:
 - a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik

- terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.
- b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
 - c) Pemberian ilegal (*illegal gratuit*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi tidak mempengaruhi keputusan bisnis. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah atas pengaruh yang dia berikan dalam kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
 - d) Pemerasan (*extortion*). Penjual menawarkan untuk memberi hadiah/suap pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.
- B. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:
- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
 - b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.
- C. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. Kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:
- a) *Timing* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya.
 - b) *Fictitious revenues* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
 - c) *Concealed liabilities and expenses* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
 - d) *Improper disclosure* yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan
 - e) *Improper asset valuation* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

B. Pengertian Pengendalian Internal

Adelin (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan. Keefektifan pengendalian internal dapat diartikan bahwa tujuan perusahaan telah berjalan sesuai perencanaan dengan

pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecurangan tidak akan terjadi.

Apabila pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik serta jika pegawai melakukan tugasnya dengan baik, maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi diri dari *fraud* (Tuannakotta 2010:284).

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Tiro (2014), terdapat dua tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Menjaga kekayaan perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah yang terbentuk dalam kategori (1) keandalan laporan keuangan, (efektivitas dan efisiensi dari operasional, dan (2) ketaatan pada hukum dan peraturan.

Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi dari sistem pengendalian internal adalah :

1. *Preventif*, yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu berupa kekeliruan ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.
2. *Detective*, yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
3. *Corective*, yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan, dan penyimpangan yang terdeteksi.
4. *Directive*, yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar.
5. *Compensative*, yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

C. Persepsi Kesesuaian Kompensasi

Pengertian Kompensasi

Beberapa para ahli juga mengungkapkan pendapat mengenai pengertian kompensasi, yaitu sebagai berikut:

Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012:175) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaannya karyawan itu.

Menurut Hasibuan (2013:117) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan kesesuaian kompensasi adalah nilai yang diterima oleh pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari penghitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut. Bisa juga diartikan sebagai hak yang harus diterima oleh pegawai atau karyawan atas kewajiban yang telah dikerjakannya berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan.

Tujuan Kompensasi

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2013:121) ada beberapa tujuan kompensasi yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan kerja Sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya

dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.
4. Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya.
5. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena *turnover* relatif kecil.
6. Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Pengaruh serikat buruh, dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
8. Pengaruh pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Sistem Kompensasi

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem.

Menurut Hasibuan (2011:124), sistem pemberian kompensasi yang umum diterapkan antara lain:

1. Sistem waktu, dalam sistem waktu besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Administrasi pengusaha sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan pada karyawan tetap maupun pekerja harian. Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayarkan sebesar perjanjian.
2. Sistem hasil (*output*), dalam sistem hasil (*output*) besarnya kompensasi yang dibayarkan selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan dan administrasi. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar, borongan cukup rumit lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan pekerjaan bisa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

Faktor-faktor Kompensasi

Menurut Hasibuan (2013:128), faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi antara lain :

1. penawaran dan permintaan
2. kemampuan dan kesediaan perusahaan
3. serikat buruh dan organisasi karyawan
4. produktivitas kerja karyawan

5. pemerintah dengan UU dan kepres
6. biaya hidup atau *cost of living*
7. posisi jabatan karyawan
8. pendidikan dan pengalaman kerja
9. kondisi perekonomian nasional

D. Ketaatan pada Aturan Akuntansi

Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Rahmawati dan Idjang (2012) menyatakan bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan (Thoyibatun (2012)). Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan pada akuntansi adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan, dipatuhi dan digunakan sebagai dasar dalam penyajian dan pembuatan laporan keuangan. Jadi untuk menjaga keandalan informasi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi suatu organisasi wajib untuk memiliki dasar atau pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan terutama kegiatan akuntansi.

Prinsip etika profesi akuntansi

Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

1) Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3) Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4) Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

5) Kehati-hatian profesional

Mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7) Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

8) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh pengendalian internal (X1), persepsi kesesuaian kompensasi (X2), keataatan pada aturan akuntansi (X3), sebagai variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:72). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Marga Jaya, Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17141.

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:73). Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini hanya mengambil 30 Sampel. Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel yang dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. (Sugiyono 2011:78). Adapun kriteria sampel berdasarkan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan ASN (Aparatur Sipil Negara)
2. Akuntan yang memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun.
3. Akuntan yang memiliki pendidikan minimal S1

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang asli (tidak melalui perantara).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang butir-butir pertanyaannya diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Thoyibatun (2012). Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan termasuk non test kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan pada aturan akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Instrumen Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

Metode Analisis Data

Data diuji dan dianalisis dengan *Statistical Package for The Social Sciences*.

Uji Hipotesis

a) Persamaan Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

A = Konstanta

X1 = Perilaku Tidak Etis

X2 = Pengendalian Internal

X3 = Budaya Organisasi

e = error

b) Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dari variabel bebas terhadap variabel terikat dari *adjusted R square* nya. Pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menjumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat.

c) Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Hasil pengujian terhadap uji t adalah:

- o Jika sig < a, thitung >ttabel dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
- o Jika sig < a, thitung >ttabel dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
- o Jika sig >a, thitung<ttabel, maka hipotesis ditolak.

d) Uji F (F-Test)

Uji Uji F-statistik pada dasarnya me-nunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, ke-mudian dibandingkan dengan F-tabel. Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) df = (n-k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Jika F-hitung> F-tabel, maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara ber-sama-sama. Sebaliknya jika F-hitung< F-tabel, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis (Uji-t)

Tabel 4.1. Uji hipotesis (uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	59.838	11.892		5.032	.000		
Pengendalian Internal (X1)	-.201	.091	-.355	-2.210	.036	.807	1.240
Persepsi Kesesuaian Kompensasi (X2)	-.576	.241	-.351	-2.395	.024	.972	1.029
Ketaatan pada Aturan Akuntansi (X3)	-.204	.091	-.364	-2.241	.034	.789	1.267

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas dengan menggunakan SPSS bahwa:

1. Pengaruh pengendalian internal (X1) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)

Berdasarkan tabel 4.1 perolehan nilai *significance* sebesar 0,036, artinya nilai sig $0,036 < 0,05$. Dengan demikian bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

2. Pengaruh persepsi kesesuaian kompensasi (X2) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)

Berdasarkan tabel 4.1 perolehan nilai *significance* sebesar 0,024, artinya nilai sig $0,024 < 0,05$. Dengan demikian bahwa persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

3. Pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi (X3) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)

Berdasarkan tabel 4.1 perolehan nilai *significance* sebesar 0,034, artinya nilai sig $0,034 < 0,05$. Dengan demikian bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Uji Hipotesis (Uji-F)

Uji hipotesis (uji-F) yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (berganda), berikut ini penjelasannya :

Tabel 4.2. Uji hipotesis (Uji-F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	237.861	3	79.287	7.327	.001 ^a
	Residual	281.339	26	10.821		
	Total	519.200	29			

a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Aturan Akuntansi (X3), Persepsi Kesesuaian Kompensasi (X2), Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan menggunakan SPSS diperoleh *significance* F sebesar 0,001, artinya nilai sig $0,001 < 0,05$, sehingga, dapat ditarik kesimpulan hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama bahwa pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Unit Keuangan dan Akuntansi Kantor Instansi Pemerintah Kota Bekasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
2. Persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
3. Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

4. Pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah pengendalian internal yang terdapat dalam instansi telah berjalan dengan baik.
2. Moralitas individu dari para pegawai perlu ditingkatkan dengan internalisasi nilai-nilai karakter dan budaya organisasi yang baik agar pegawai dapat bekerja dengan jujur dan menghindari tindakan untuk melakukan kecurangan akuntansi.
3. Untuk instansi di harapkan untuk dapat lebih mengefektifkan pengendalian internal, dan mematuhi aturan akuntansi serta lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kompensasi berupa reward dan punishment sehingga pegawai lebih semangat dan termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ACFE (2016). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners.
- [2] Adelin, Vani. 2013. *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Akuntansi (Studi Empiris Pada BUMN di Kota Padang)*. Jurnal UNP. Universitas Padang.
- [3] Fachrunisa, Aisah. 2015. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar*. Jurnal FEKON. Universitas Riau. Vol. 2. No. 2
- [4] Fauwzi. M. Glifandi. 2011. *Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Undip. Universitas Diponegoro.
- [5] Hasibuan, Malayu. S. P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar*. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- [6] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI
- [7] Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- [8] Kemendikbud. 2013. *Bahasa Indonesia Bahasa Pergaulan Internasional. Dikbud No.6. Tahun IV*. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [9] Priantara, Diaz. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta. 2013.
- [10] Rahmawati, Ardiana Peni dan Soetikno Idjang. 2012. *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)*. Jurnal Undip. Universitas Diponegoro.
- [11] Subekhi, Akhmad, dan Mohammad Jauhar. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- [12] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- [13] Thoyibatun, Siti. 2012. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan : Universitas Negeri Malang. ISSN 1411-0393 Vol.16 No.2
- [14] Tiro, A.A.A. 2014. *Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pemerintah Kota Palopo*. Journal : Universitas Hasanuddin Makasar.
- [15] Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2 : Jakarta.
- [16] Tuanakotta, Theodorus. M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- [17] Yuliani, Silvia. 2018. *Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi : Universitas Negeri Padang. Vol.6 No.3.
- [18] Yulianti, Diah Fitri. (2016). *Pengaruh Moralitas Individu, Penegakan Hukum, Keadilan Distributive, Keadilan Prosedural, Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Journal. Riau. FE Universitas Riau.
- [19] Zimbelman, M. F. Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. 2014. *Akuntansi Forensik (Edisi 4)*. Terj. N. Puspasari, Suhernita & R. Saraswati. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [20] <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>